

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Oleh :

DANIEL^{1*}

NIM : E1011171038

Ida Rochmawati^{2*}, Kartika Ningtias^{2*}

Email : daniel21.untan.ac.id@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau”. Implementasi ini berlandaskan hukum peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Hasil penelitian ini mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Secara Sosialisasi; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penyaluran; penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik, dan penyaluran bantuan sejauh ini sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Pemanfaatan; pemanfaatan bantuan juga sudah sejalan dengan tujuan dari program BPNT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat penerima bantuan atau KPM yang membutuhkan.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di beberapa negara berkembang adalah permasalahan ekonomi dan kemiskinan yang merupakan permasalahan turut berpengaruh terhadap banyak aspek lainnya. Kemiskinan yang mencakup banyak aspek ini diantaranya adalah aspek ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah kemiskinan dalam dimensi sosio-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi perkerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-

terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kemiskinan terus-menerus menjadi masalah berkepanjangan yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh Dinsos diberikan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, serta mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif.

warong yang bekerjasama dengan bank. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran

non tunai. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Adapun landasan hukum dari adanya program ini adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai.

Tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai

mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada

KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk BPNT, KKS digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik, sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa oleh KPM. KKS menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan. Jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang. Manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai. Besaran manfaat BPNT adalah Rp200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Jadi berdasarkan keseluruhan jumlah penerima bantuan dari adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, total jumlah keseluruhan nominal anggaran bantuan yang di berikan untuk Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yaitu sebesar Rp.44.600.000. Jumlah tersebut di dapat dari jumlah penerima bantuan atau KPM yaitu sejumlah 223 penerima bantuan atau KPM kemudian dikalikan dengan jumlah nominal bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan atau KPM yaitu sebesar Rp. 200.000. Anggaran sebesar Rp. 44.600.000 tersebut diberikan setiap

sebulan sekali kepada kecamatan yang nantinya akan di berikan kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp. 200.000/bulan untuk setiap perkepala keluarga penerima manfaat (KPM). Dan jika dihitung untuk total keseluruhan anggaran dari Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk Kabupaten Sanggau yaitu Rp. 1.954.000.000. Jumlah tersebut didapat dari jumlah keseluruhan penerima bantuan di Kabupaten Sanggau yaitu sejumlah 9770 orang dikalikan dengan jumlah nominal bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan (KPM) sebesar Rp. 200.000/bulan.

2. Identifikasi Masalah

Adapun kendala dalam implementasi program bantuan pangan non tunai sebagai berikut :

1. Adanya masyarakat (KPM) belum memahami tujuan dan manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Adanya keterbatasan kesiapan *e-warong* dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan.
3. Adanya infrastruktur yang belum memadai dalam penyaluran bantuan program

3. Rumusan Masalah

Dilihat dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi diatas, maka dapat

diperoleh rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu: mengapa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau belum berjalan dengan maksimal ?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Diharapkan bahwa dengan adanya penelitian implementasi program BPNT dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis di dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap khasanah keilmuan, khususnya bagi yang mengambil fokus penelitian pada kebijakan publik terkait mengenai kebijakan yang telah digunakan. Ada beberapa hal yang menjadi manfaat praktis dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut, Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Aparatur

Pemerintahan Daerah yaitu dalam menangani kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu khususnya yang berada di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dari segi kebutuhan sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta berusaha meningkatkan gizi bagi masyarakat penerima bantuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik biasanya dituang dalam peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah yang merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintahan dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik adalah menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu. Fungsi kebijakan publik adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ekstraktif dan distributif serta menjamin hak asasi warga masyarakat dari

penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintah atau kelompok dominan di masyarakat. William N. Dun (dalam pasolong 2010, 39) mengatakan bahwa: kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”.

2. Kosep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu harapan dari proses kebijakan publik dan sekaligus studi yang *crucial*, bersifat *crucial* karena bagaimana baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan itu tidak bisa diwujudkan, demikian pula sebaliknya bagaimana persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino 2014, 139) mengatakan bahwa “Implementasi Kebijakan Publik sebagai suatu proses dan hasil (*output*). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dapat dilihat

dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai”. Menurut Lineberry (dalam Fadillah Putra 2003, 81) implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan”. Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti implementasi adalah “Kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan”. Sebuah program atau kebijakan memang lebih mudah ketika dirumuskan, namun begitu sulit ketika dijalankan, karena kebijakan yang telah dibuat tidak mungkin dapat memuaskan semua orang, termasuk kelompok sasaran dari kebijakan itu sendiri. Akan tetapi implementor tetap bisa memaksimalkan pelaksanaannya dengan cara menjalankan

program atau kebijakan tersebut seefektif mungkin.

3. Model-Model

Kebijakan Publik menurut Erwan

Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015, 75) ada 3 (tiga) aktivitas yang bisa mewujudkan proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Sosialisasi

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015, 75) menyatakan bahwa untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal sebagai berikut: penjelasan lengkap tentang tujuan, manfaat serta keuntungan yang akan

dirasakan oleh kelompok sasaran, *stakeholder* yang terlibat dalam mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program. Kegiatan penyampaian informasi ini bisa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok sasaran) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok sasaran yang lain.

2. Penyaluran (*Delivery Activities*)

Yaitu kegiatan untuk menyampaikan *policy output* (Hasil kebijakan) kepada kelompok sasaran. Kegiatan untuk menyampaikan *policy output* kepada kelompok sasaran ini yang dalam prespektif sempit sebagaimana dikatakan oleh Ripley (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti sering dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan. Tujuan dari penyaluran (*Delivery activities*) adalah sampainya *policy output* kepada kelompok sasaran. Realitas penyaluran (*Delivery activities*) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pemberian pelayanan (seringkali gratis) mampu realisasi bantuan

(bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok). Dengan demikian Penyaluran (*Delivery activities*) dinilai berhasil apabila pelayanan, hibah, transfer dan lain-lainnya tersebut sampai atau diterima kepada kelompok sasaran dengan baik. Kriteria baik disini dijelaskan melalui beberapa tahap indikator, yaitu: tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas tepat kualitas, dan tepat sasaran.

3. Pemanfaatan

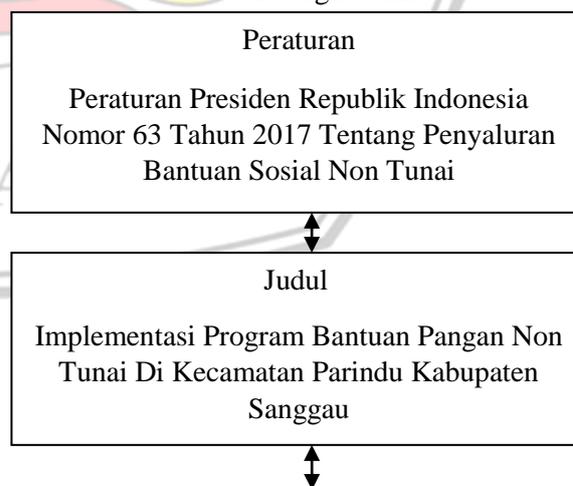
Setelah kelompok sasaran menerima penyaluran (*Delivery activities*), maka tahap berikutnya adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan kelompok sasaran. Dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dana tersebut digunakan sesuai dengan komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Minsalnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan ketahanan pangan tingkat keluarga, penerimaan manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Manfaat lainnya, program ini akan dapat meningkatkan transaksi non tunai sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai

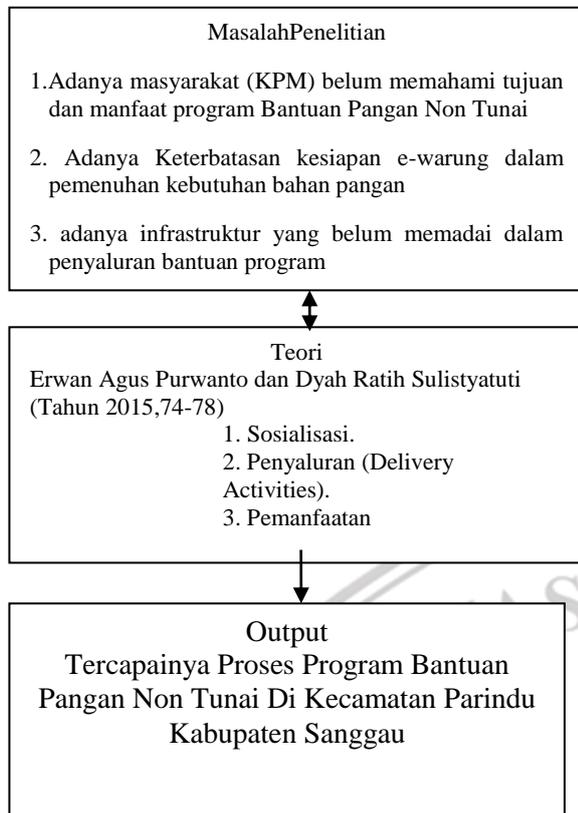
(GNNT) yang sudah digagas Bank Indonesia, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, dari sebelumnya dilakukan secara tunai. Sebab, saat ini sudah beralih pada bantuan non tunai dan serta yang tidak kalah pentingnya, dengan Bantuan Pangan Non Tunai ini, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil.

Dari kedua teori yang dikembangkan oleh Lineberry dan Erwan Agus Purwanto. Peneliti akan menggunakan teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti karena lebih tepat untuk menganalisis proses implemmentasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kabupaten Sanggau.

4. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Pikir





C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak Sugiyono (2013, 3). Sementara menurut Moleong (2011,6) pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain. Sugiyono (2013,3) mengatakan bahwa “metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam,

suatu data yang bermakna”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan. Secara umum data yang telah di peroleh dari penelitian yang dilakukan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada dalam penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan lokasi penelitian. Dimana peneliti mencari fakta-fakta yang ada dan digunakan untuk dapat saat keperluan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan menurut Sugiyono (2013, 62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.Arikunto (2006, 136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses pelaksanaan implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kecamatan parindu kabupaten sanggau, berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara yang didasari pada telah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulisyatuti dengan aktivitas utama yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015, 75) menyatakan bahwa untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi

aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian dengan penyelenggaraan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Parindu. Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu sudah dilaksanakan, didalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyampaikan perihal terkait Program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu tata cara penyaluran bantuan, pengambilan bantuan, serta tujuan dari adanya program bantuan tersebut.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran (*Delivery activities*) yaitu kegiatan untuk menyampaikan *policy output* (hasil kebijakan) kepada kelompok sasaran. Tujuan dari penyelenggaraan adalah sampainya *policy output* kepada kelompok sasaran. Realisasi penyaluran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pemberian pelayanan (seringkali gratis) maupun realisasi bantuan (bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok).

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyelenggara Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kecamatan Parindu. Dalam penyaluran dana program BPNT pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak Bank BRI dalam proses penyaluran bantuan.

3. Pemanfaatan

Setelah kelompok sasaran menerima penyaluran (*Delivery activities*), maka tahap berikutnya adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan kelompok sasaran. Dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dana tersebut digunakan sesuai dengan komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyelenggara Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kecamatan Parindu sudah berjalan dengan baik dan sesuai tuntutan dari pelaksanaan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sejauh ini

masyarakat penerima bantuan memanfaatkan bantuan untuk keperluan yang tepat namun masih terdapat kendala dalam penyaluran karena E-Warong yang ada di Kecamatan Parindu hanya mempunyai satu E-Warong saja, yang mana jumlah serta luas dari Kecamatan Parindu ini terbilang cukup luas dan jumlah desa yang lumayan banyak sehingga pada dasarnya dibutuhkan penambahan E-Warong kembali.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Dilihat dari teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti bahwa dalam implementasi ada 3 (tiga) aktivitas yakni, Sosialisasi, penyaluran (*delivery activities*) dan pemanfaatan. Maka penulis memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau melaksanakan sosialisasi dengan cara secara langsung yaitu melalui rapat sosialisasi program bantuan, dengan begitu langsung dan dapat berinteraksi dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam melaksanakan

sosialisasi penyelenggaraan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tidak pernah menggunakan cara sosialisasi secara tidak langsung.

2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penyaluran dana menggunakan sistem non Tunai. Bantuan akan di ambil berupa barang sembako dan pengambilan bantuan, diambil di toko yang disebut E-Warong yang tersedia di setiap kecamatan.

Dalam penyaluran dana bantuan ini pihak pemerintah berkerja sama dengan pihak dari Bank BRI. Untuk waktu pengambilan dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yaitu akan diambil setiap sebulan sekali oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membawa kartu KKS sebagai syarat wajib bukti pengambilan bantuan.

3. Pemanfaatan Dana

Dalam penyaluran dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penyaluran dana menggunakan sistem non Tunai. Bantuan akan di ambil berupa barang

sembako dan pengambilan bantuan, diambil di toko yang disebut E-Warong yang tersedia di setiap kecamatan.

Dalam penyaluran dana bantuan ini pihak pemerintah berkerja sama dengan pihak dari Bank BRI. Untuk waktu pengambilan dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yaitu akan diambil setiap sebulan sekali oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membawa kartu KKS sebagai syarat wajib bukti pengambilan bantuan.

Untuk sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau sejauh ini sejauh ini sudah baik dan terbilang tepat sasaran. Kemudian untuk dampak yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau ini adalah masyarakat sangat terbantu terutama dalam kebutuhan rumah tangga kebutuhan sembako setiap bulan nya bisa terpenuhi dengan adanya bantuan yang diberikan. Disisi lain, kebutuhan gizi yang sebelumnya masih kurang dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat tertutupi oleh bantuan ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Implementasi Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Maka mengemukakan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Dalam aspek komunikasi khususnya di dalam sosialisasi terkait program bantuan harus ditingkatkan lagi agar pendampingan serta pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat.
2. Perlu ditingkatkan lagi pembinaan integritas yang diperuntungkan bagi aparatur dan pihak di daerah untuk memperbaiki aspek SDM dan juga disposisi yang belum berjalan dengan maksimal.
3. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai tujuan program BPNT
4. Proses monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban program BPNT diharapkan dapat

selalu ditingkatkan agar indikator-indikator keberhasilan dari program BPNT tercapai khususnya didalam implementasi program BPNT.

5. Pemanfaatan dana bantuan perlu ditingkatkan lagi, agar lebih baik dan tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat, kemudian solusi dari e-warong yang mengalami kekurangan bahan pangan. Maka dari itu kesiapan dari penyalur bantuan harus lebih sigap agar penyaluran yang telah terjadwalkan dapat terlaksana dan tidak kekurangan bahan pangan.

F. DAFTAR PUSTAKA

SumberBuku:

- Agus, erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik:konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Ali Faried H. 2013. *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradimatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: PT. Rajagrafaindo Persada.
- Atmosudirjo, Prabudi. 1982. *Administrasi Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Penelitian Ilmu*

- Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Harbani, Pasolong. 2017. *Teori Administrasi Publik*. cv Alfabeta.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi,Revormasi,Formulasi*. Intrans Publishing.
- Kurniawan, Hendra. 2008. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Miles, Mathew B., dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moeleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mustafa, Delly H. 2014. *Birokrasi Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Padji, Santosa. 2008. *Administrasi Publik- TeoridanAplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sumber Perundangan-Undangan :**
- Peraturan Presiden. Republik Indonesia. *Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*.
- Peraturan Menteri Sosial. *Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940)*.
- Keputusan Menteri Sosial. *Nomor 140/HUK/2017 Tentang Penetapan Jumlah Penerimaan Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018*.
- Sumber Skripsi:**
- Basriati.B.2021”Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Muhammadiyah.Makassar.
- Eko Yudianto Yunus.2019”Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”.Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Panca Marga Probolinggo.ISSN 2088-7469(paper)ISSN 2407-6864(online). Volume 9 Nomor 2.

Internet:

<https://sanggaukab.bps.go.id>, diakses pada
12 Oktober 2021

Buku Kecamatan Parindu Dalam Angka
2019.

